



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS I A KHUSUS



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

bangga
melayan
bangsa

N
K RUPSI

PERJANJIAN KINERJA 2026



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfi Sahrin Usup

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Suharjono

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

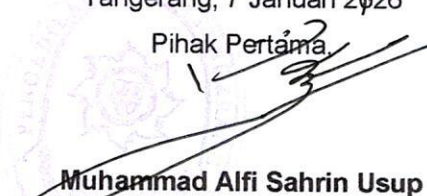
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

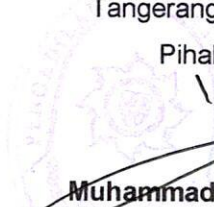
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Suharjono



Tangerang, 7 Januari 2026
Pihak Pertama,

Muhammad Alfi Sahrin Usup



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

SATKER : PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN : 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91%
		b) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		c) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		d) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan negeri kepada para pihak	100%
		e) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		f) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		g) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		h) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		i) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40%
		j) Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%
		k) Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		l) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3.80
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70
		b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	99%
		c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	99%
		d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	85%
		e) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	85%
		f) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.15

No. Kegiatan:

Anggaran:

1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi

Rp38.129.340.000,00

2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp545,890,000,00

Pihak Kedua,



Suharjono

Tangerang, 7 Januari 2026

Pihak Pertama,



Muhammad Alfi Sahrin Usup